LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

| DAFTA | R ISIi |
|----------|--|
| BABIP | ENDAHULUAN 1 |
| 1.1 | Latar Belakang1 |
| 1.2 | Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat2 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan3 |
| BAB II P | ENGUMPULAN DATA SKM5 |
| 2.1 | Pelaksana SKM5 |
| 2.2 | Metode Pengumpulan Data5 |
| 2.3 | Lokasi Pengumpulan Data6 |
| 2.4 | Waktu Pelaksanaan SKM6 |
| 2.5 | Penentuan Jumlah Responden |
| BAB III | HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 8 |
| 3.1 | Jumlah Responden SKM8 |
| 3.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)9 |
| BAB IV | ANALISIS HASIL SKM10 |
| 4.1 | Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan10 |
| 4.2 | Rencana Tindak Lanjut |
| BAB V K | ESIMPULAN12 |
| LAMPIR | AN |

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Banten, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357):
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan informasi publik yang telah diberikan oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten;
- 5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 09 TAHUN 2024 tanggal 26 April 2024 tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Informasi Publik pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yaitu:

- Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

- ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Biro Umum dan Perlengkapan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

| Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Hari Kerja |
|------------------------------------|---|--|
| Persiapan | Oktober 2024 | 4 |
| Pengumpulan Data | November 2024 | 15 |
| Pengolahan Data dan Analisis Hasil | November 2024 | 5 |
| Penyusunan dan Pelaporan Hasil | Desember 2024 | 5 |
| | Persiapan Pengumpulan Data Pengolahan Data dan Analisis Hasil | Persiapan Oktober 2024 Pengumpulan Data November 2024 Pengolahan Data dan Analisis Hasil November 2024 |

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu satu bulan adalah sebanyak 210 orang.

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 100 orang. Namun setelah dilakukan penyebaran kuesioner, terkumpul data sebanyak 72 responden.

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 10 | 10 | 220 | 140 | 1200 | 291 |
| 15 | 14 | 230 | 144 | 1300 | 297 |
| 20 | 19 | 240 | 148 | 1400 | 302 |
| 25 | 24 | 250 | 152 | 1500 | 306 |
| 30 | 28 | 260 | 155 | 1600 | 310 |
| 35 | 32 | 270 | 159 | 1700 | 313 |
| 40 | 36 | 280 | 162 | 1800 | 317 |
| 45 | 40 | 290 | 165 | 1900 | 320 |
| 50 | 44 | 300 | 169 | 2000 | 322 |
| 55 | 48 | 320 | 175 | 2200 | 327 |
| 60 | 52 | 340 | 181 | 2400 | 331 |
| 65 | 56 | 360 | 186 | 2600 | 335 |
| 70 | 59 | 380 | 191 | 2800 | 338 |
| 75 | 63 | 400 | 196 | 3000 | 341 |
| 80 | 66 | 420 | 201 | 3500 | 346 |
| 85 | 70 | 440 | 205 | 4000 | 351 |
| 90 | 73 | 460 | 210 | 4500 | 354 |
| 95 | 76 | 480 | 214 | 5000 | 357 |
| 100 | 80 | 500 | 217 | 6000 | 361 |
| 110 | 86 | 550 | 226 | 7000 | 364 |
| 120 | 92 | 600 | 234 | 8000 | 367 |
| 130 | 97 | 650 | 242 | 9000 | 368 |

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 72 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

| No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|---------------|------------------|--------|------------|
| 1 | JENIS KELAMIN | LAKI | 53 | 73,6% |
| | | PEREMPUAN | 19 | 26,4% |
| 2 | PENDIDIKAN | SMP | 1 | 1,4% |
| | | SMA | 29 | 40,3% |
| | | D3 | 3 | 4,2% |
| | | S1 | 31 | 43% |
| | | S2 | 8 | 11,1% |
| 3 | PEKERJAAN | PNS | 16 | 22,2% |
| | | SWASTA | 9 | 12,5% |
| | | WIRASWASTA | 11 | 15,3% |
| | | LAINNYA | 36 | 50% |
| | | PELAYANAN | | |
| 4 | JENIS LAYANAN | INFORMASI PUBLIK | 1 | |

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

| | | Nilai Unsur Pelayanan | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| IKM per unsur | 3,17 | 3,24 | 3, 15 | 3,40 | 3,22 | 3,64 | 3,62 | 3, 15 | 3,44 |
| Kategori | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
| IKM Unit Layanan | 79,44 (B atau Baik) | | | | | | | | |



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- Waktu Penyelesaian dan Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,15, selanjutnya Persyaratan yang mendapatkan nilai 3,17 adalah unsur terendah kedua.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai 3,64 dan Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai 3,62 serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai 3,44.

Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner diperoleh beberapa kritik dan saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- "Integrasi data konvensional ke dalam layanan online untuk data yang bersifat terbuka".
- · "kursi tunggu diperbanyak agar lebih nyaman dalam menunggu".
- "Pembuatan Pylon Sign outdoor, yang memuat Produk Layanan, nomor Call Center WhatsApp Bisnis Resmi Biro Umum, dan Social Media aktif resmi (IG, Facebook, Website) yang terintegrasi keseragaman design".
- "Semoga lebih memperhatikan kembali dalam hal pelayanan kepada masyarakat agar langsung ditindak lanjut".
- "Mohon diperluas area parkir untuk tamu".

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Waktu Penyelesaian agar ditingkatkan lagi guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.
- Sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar diperhatikan sehingga terciptanya kenyamanan pengguna layanan, seperti penyediaan kursi tunggu untuk pengguna layanan dan pengaturan area parkir tamu.

 Persyaratan yang dimiliki dalam pelayanan dibuat lebih sederhana, mudah dipahami dan tepat sasaran.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

| | | | Waktu | | | | |
|-----|-------------------------|---|-------|----|-----|----|---------------------|
| No. | Prioritas Unsur | Program / Kegiatan | TW | TW | TW | TW | Penanggung Jawab |
| | | | 1 | II | III | IV | |
| 1 | Waktu Penyelesaian | Penyediaan informasi terkait mekanisme alur pelayanan (mencakup waktu penyelesaian). | ٧ | | | | Bagian Umum |
| 2 | Sarana dan Prasarana | Penyediaan kursi tunggu untuk pengguna layanan. | | ٧ | | | Bagian Umum |
| | | Pengaturan area parkir tamu | | ٧ | | | Bagian Umum |
| 3 | Persyaratan | Penyediaan informasi terkait mekanisme alur pelayanan (mencakup waktu penyelesaian). | ٧ | | | | Bagian Umum |

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Oktober hingga Desember 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 79,44.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Penyelesaian, Sarana dan Prasarana serta Persyaratan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi Pelaksana,
 Perilaku Pelaksana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

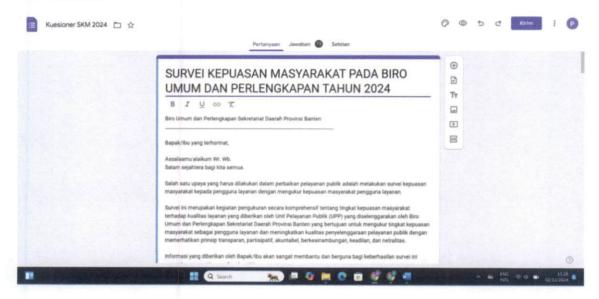
Serang, 09 Desember 2024

Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan

Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si NIP. 19670928 199303 2 009

LAMPIRAN

1. Kuesioner



2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

